

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG

Silvi Syahrani Mardiana¹, Shalma Shalshabilla², Natashya Rizkia Putri Mustari³, Zhafira Aura Pradipta⁴, Kalista Berliana Putri⁵, Siti Kholishoh Ismatul Aini⁶, Yayan Nuryanto⁷

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online Juni 2025

silvi23001@mail.unpad.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstract. *Poverty is a structural problem that has been faced by various countries around the world, including Indonesia as a developing country. One of the regions in Indonesia that certainly faces this problem is the Bandung Regency, West Java Province. This research is motivated by the decline in the number of poor people in Bandung Regency since 2022, one of which is influenced by the Kelompok Usaha Bersama (KUBE) program. Through a descriptive qualitative method, we analyze the implementation of KUBE by the Social Service of Bandung Regency starting from planning, which involves various groups through Musrenbang.*

Furthermore, implementation is carried out with social guidance and provision of assistance to business groups in the form of goods. Finally, the monitoring carried out by the Bandung Regency Social Service is by assigning assistants to each region. However, the effectiveness of the implementation of KUBE was only felt in 2022 due to the termination of assistance and the splitting of groups. All of the obstacles experienced by the Bandung District Social Services Office began to be improved in various new ways that will begin in the 2026 period.

Keywords: *Poverty, Program Implementation, Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*

Abstrak. Kemiskinan menjadi permasalahan struktural yang telah dihadapi oleh berbagai negara di belahan dunia termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Salah satu daerah di Indonesia yang tentunya menghadapi permasalahan ini adalah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bandung sejak tahun 2022 yang salah satunya dipengaruhi oleh program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Melalui metode deskriptif kualitatif, kami menganalisa implementasi KUBE oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung mulai dari perencanaan, yang melibatkan berbagai kelompok melalui Musrenbang. Selanjutnya, pelaksanaan dilakukan dengan bimbingan sosial dan pemberian bantuan kepada kelompok usaha dalam bentuk barang. Terakhir, *monitoring* yang dilakukan oleh DinSos Kabupaten Bandung adalah dengan ditugaskannya pendamping pada tiap daerah. Namun, keefektifan implementasi dari KUBE baru terasa pada tahun 2022 akibat keputusan pendampingan dan kelompok yang terpecah. Keseluruhan kendala yang dialami oleh Dinsos Kabupaten Bandung mulai dilakukan pembenahan dengan berbagai cara baru yang akan dimulai pada periode tahun 2026.

Kata Kunci: Kemiskinan, Implementasi Program, Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

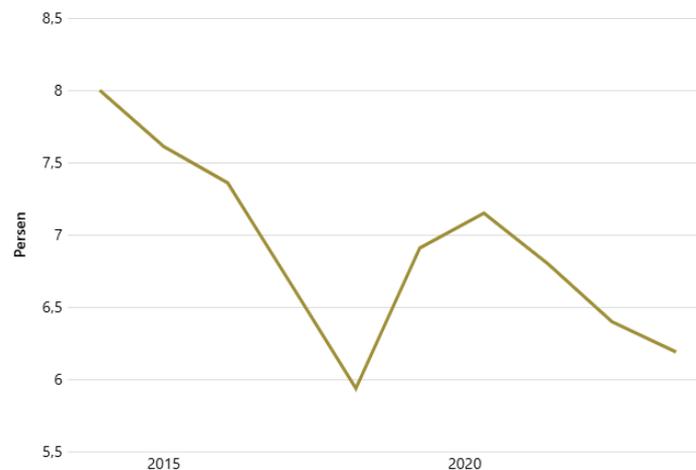
PENDAHULUAN

Persoalan struktural yang telah lama menjadi perhatian global adalah kemiskinan yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan manusia. Tentunya, permasalahan ini selalu menjadi tantangan besar bagi banyak negara di dunia, terutama negara berkembang. Kemiskinan tidak hanya dimaknai sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perumahan layak, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Keadaan ini menciptakan siklus ketimpangan yang sulit diputus dan berpotensi memunculkan dampak lanjutan, seperti meningkatnya angka pengangguran, kriminalitas, hingga keterbelakangan pembangunan di suatu wilayah.

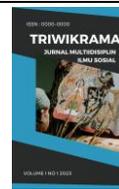
Sebagai negara berkembang, Indonesia pun masih menghadapi persoalan kemiskinan. Meskipun angka kemiskinan mengalami tren penurunan secara statistik, namun persoalan ini belum terselesaikan secara menyeluruh. Berbagai faktor-faktor seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya lapangan kerja produktif, dapat memperlambat proses pengentasan kemiskinan. Kondisi ini semakin sulit diatasi karena kerentanan bencana alam, inflasi harga kebutuhan pokok, dan kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Dimana hal tersebut mempengaruhi daya beli dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pemerintah Indonesia telah merancang dan menerapkan berbagai kebijakan serta program pemberdayaan masyarakat guna menekan angka kemiskinan, dengan pendekatan yang semakin beragam dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, strategi penanggulangan kemiskinan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan langsung, tetapi juga diarahkan pada upaya pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian masyarakat miskin dengan memberikan akses pada sumber daya, pelatihan keterampilan, dan dukungan kelembagaan agar mampu keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan.

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung 2015-2024



Sumber: databoks



Kabupaten Bandung sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat juga tidak luput dari persoalan kemiskinan. Berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan geografis menjadikan tingkat kemiskinan di wilayah ini cukup menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Namun, data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya tren positif dalam penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bandung sejak tahun 2022. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah ini.

Penurunan angka kemiskinan ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama hasil dari rangkaian kebijakan dan program yang telah dirancang dan dijalankan oleh pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir. Program-program ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, serta penyediaan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Dimana penguatan kapasitas individu dan kelompok masyarakat seringkali menjadi aspek utama dalam kerangka kebijakan yang telah dibuat.

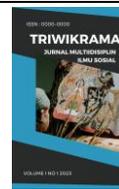
Salah satu program yang telah lama dijalankan oleh pemerintah dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Program ini dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi melalui pembentukan kelompok usaha produktif bagi masyarakat berpenghasilan rendah. KUBE pada dasarnya telah diluncurkan sejak beberapa tahun yang lalu, namun efektivitasnya dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bandung baru tampak lebih signifikan sejak tahun 2022.

Fakta bahwa program KUBE ini mulai menunjukkan dampak nyata pada penurunan kemiskinan sejak 2022 menimbulkan berbagai pertanyaan terkait alasan mengapa program yang telah lama berjalan ini baru memperlihatkan hasil yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tentunya, hal tersebut berkaitan dengan perubahan pola implementasi, pengelolaan, dukungan, dan pengawasan yang membuat program ini menjadi lebih efektif. Dinamika keberhasilan dari program ini menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas dalam konteks kemiskinan.

Penelitian sebelumnya oleh Sukirman, dkk (2021) menunjukkan bahwa semenjak dilaksanakannya program KUBE pada tahun 2009, jumlah kelompok dari hasil program ini terus bertambah. Namun, hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa hingga tahun 2021, masih banyak kelompok yang menjadi vakum atau tidak berkembang. Hal tersebut terjadi karena jangka waktu pelaksanaan yang tidak jelas membuat program tersebut berjalan tanpa dibatasi waktu dan sasaran yang ingin dicapai.¹ Maka, permasalahan ini menjadi perhatian khusus bagaimana perkembangan dari implementasi program ini di tahun berikutnya.

Selain memahami implementasi dari program ini, dampak nyata dari program KUBE terhadap kehidupan masyarakat penerimanya juga menjadi suatu hal penting dalam suatu implementasi kebijakan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas usaha, serta menciptakan keberlanjutan ekonomi bagi kelompok-kelompok usaha yang dibentuk. Evaluasi terhadap

¹ Sukirman, dkk, (2021), Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kabupaten Bandung, *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora, Dan Kebijakan Publik*, 4(2).



aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menilai sejauh mana program KUBE telah berhasil menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi persoalan kemiskinan, terutama di Kabupaten Bandung. Dengan demikian, kami mengkaji terkait bagaimana implementasi Program KUBE beserta dampaknya bagi masyarakat Kabupaten Bandung dengan judul “Implementasi Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung”

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Program

Menurut Riggs (2005), implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui organisasi, interpretasi, dan penerapan (Ratmiko, 2005).² Hal ini menegaskan bahwa implementasi bukan sekadar pelaksanaan mekanis, melainkan proses dinamis yang membutuhkan koordinasi dan pengelolaan sumber daya secara optimal.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi yang bersifat multidimensional, yang mencerminkan ketidakmampuan individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ketidakmampuan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan aset, rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketimpangan distribusi pendapatan, keterasingan sosial, serta terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan informasi. Kondisi-kondisi tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu lingkaran kemiskinan yang kompleks, yang sulit diputus tanpa adanya intervensi yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

KUBE (Kelompok Usaha Bersama) adalah program Kementerian Sosial RI yang bertujuan memberdayakan masyarakat miskin melalui bantuan modal usaha dan pendampingan sosial dalam mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program ini dilandasi oleh berbagai regulasi seperti UU No. 11 Tahun 2009 dan UU No. 13 Tahun 2011, serta menekankan pembinaan kewirausahaan, pelatihan, dan penguatan kapasitas anggota. Keberhasilan KUBE bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, sinergi dengan pendamping, serta adaptasi terhadap teknologi, seperti strategi pemasaran digital. Tujuan utama KUBE meliputi peningkatan pendapatan keluarga miskin, penanaman semangat kewirausahaan, transformasi sosial melalui kerja sama kelompok, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, serta pengurangan kesenjangan sosial dan urbanisasi. Program ini dirancang agar tidak hanya membantu secara ekonomi, tetapi juga membangun kemandirian dan keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

² Universitas Medan Area. (2020). *BAB II: Tinjauan pustaka*. Dalam *Skripsi Universitas Medan Area*. hlm. 18.



METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Bandung pada bulan Mei 2025. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian dilakukan untuk memberikan deskripsi dan penjelasan dengan rinci terhadap permasalahan yang akan dibahas serta mendapatkan data dan informasi penting terkait implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial dan dampaknya terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung. Perolehan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara merupakan salah satu cara yang sering dipakai dalam mengumpulkan data riset kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan macam-macam data dari responden dalam berbagai situasi dan konteks (Saroso (2017:47) dalam Yusra (2021:18)). Wawancara dilakukan dengan M. Fitriani Ramadhan, Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Selanjutnya, observasi/pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung subjek riset dengan tujuan tertentu. Observasi digunakan untuk menghimpun data riset berdasarkan pada pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2007:118). Pengamatan dalam riset ini adalah dengan mengamati implementasi KUBE oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Dokumentasi merupakan cara yang dipakai untuk mendapatkan informasi yang berbentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung riset. Studi dokumen adalah pelengkap dari observasi dan wawancara agar dapat dipercaya atau memiliki kredibilitas tinggi bila didukung oleh foto-foto dan karya tulis akademik yang sudah ada (Sugiyono 2018:476). Dalam riset ini, data dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait topik permasalahan, yaitu implementasi KUBE di Kabupaten Bandung.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi dan Situs Riset

Kabupaten Bandung secara geografis terletak di bagian selatan kawasan metropolitan Bandung Raya. Wilayah ini memiliki luas sekitar 176.238,67 hektar dan terdiri dari 31 kecamatan, 280 desa, serta 10 kelurahan. Letaknya berada di antara koordinat 107°22'–108°50' Bujur Timur dan 6°41'–7°19' Lintang Selatan.³

Salah satu isu krusial di Kabupaten Bandung adalah kemiskinan. Berdasarkan laporan BPS, persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat 6,80% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini turun menjadi 6,40% pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 6,19% pada tahun 2024.⁴

Program KUBE sendiri menysasar kelompok-kelompok masyarakat miskin yang memiliki semangat untuk berwirausaha secara kolektif. Kabupaten Bandung menjadi salah satu wilayah yang aktif melaksanakan program ini, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam

³ BPS Kabupaten Bandung. (2024). *Kabupaten Bandung dalam Angka*.

⁴ Dinas Sosial Kabupaten Bandung. (2024). *Laporan Program Pemberdayaan Masyarakat*.

mengurangi angka kemiskinan melalui strategi pemberdayaan sosial ekonomi. Program ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Fokus utama Dinas Sosial adalah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, terutama dalam aspek perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan dan kurang mampu⁵

Dinas Sosial Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Bencana, UPTD Layanan Ketelantaran dan Disabilitas, UPTD Tuna Sosial, dan Jabatan Fungsional. Masing-masing bagian kelembagaan memiliki tupoksinya masing-masing yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No. 12 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.

Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bandung dimulai dari proses perencanaan partisipatif yang dikenal dengan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (MUSRENBANG). MUSRENBANG merupakan forum musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dari tingkat paling bawah yaitu RT, RW, Desa, hingga Kecamatan. Melalui forum ini, aspirasi dan usulan program pembangunan, termasuk program KUBE, diajukan dan dibahas secara berjenjang.⁶

Kepala desa dan perangkat desa berperan aktif mengusulkan kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan KUBE. Usulan tersebut kemudian diteruskan ke tingkat kecamatan dan akhirnya sampai ke Dinas Sosial Kabupaten Bandung melalui Bappeda (Badan Perencanaan Daerah) atau Bappeda, yang bertugas membuat kriteria teknis program sesuai kebutuhan daerah.

Dalam proses perencanaan, Dinas Sosial Kabupaten Bandung menetapkan kriteria teknis yang harus dipenuhi oleh kelompok calon penerima bantuan KUBE. Kriteria ini menjadi dasar seleksi yang ketat agar bantuan tepat sasaran dan efektif dalam memberdayakan masyarakat miskin. Beberapa kriteria utama yang digunakan antara lain:

- 1) Kelompok terdiri dari masyarakat miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- 2) Setiap kelompok terdiri dari minimal 5 orang anggota yang memiliki potensi usaha yang sama dan memiliki embrio usaha yang dapat dikembangkan.
- 3) Kelompok harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan bantuan secara bersama-sama.
- 4) Adanya rekomendasi dan pengesahan dari kepala desa melalui berita acara pengukuhan kelompok KUBE sebagai salah satu syarat administratif.

⁵ Dinas Sosial Kabupaten Bandung, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Bandung*, Dinsos Bandung Kab.

⁶ Hasil Wawancara Terkait Inovasi KUBE Bersama Bapak M. Fitrihan Ramadhan, Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Setelah usulan kelompok KUBE masuk ke Dinas Sosial, dilakukan proses verifikasi dan validasi administratif dan teknis yang ketat. Proses ini melibatkan pengecekan ulang data DTKS, konfirmasi di lapangan oleh petugas Dinas Sosial, dan validasi dokumen pendukung seperti surat pengukuhan kelompok dari kepala desa. Setelah proses ini selesai dan kelompok dinyatakan layak, Dinas Sosial mengajukan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan dalam keputusan resmi sebagai penerima bantuan KUBE.

Perencanaan bantuan KUBE di Kabupaten Bandung disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, seperti usaha ternak, warung, konveksi, dan pengolahan pangan, agar tepat sasaran dan meningkatkan peluang keberhasilan. Pendanaan berasal dari APBD dan Pokok Pikiran Dewan, namun keterbatasan anggaran menuntut seleksi ketat dan proses verifikasi mendalam agar bantuan hanya diberikan pada kelompok yang benar-benar berpotensi dan berkomitmen.

b. Tahap Pelaksanaan

Sebelum kelompok KUBE menerima bantuan, Dinas Sosial Kabupaten Bandung memberikan bimbingan sosial secara intensif. Bimbingan ini bertujuan agar anggota kelompok memahami secara jelas tujuan bantuan, peruntukan barang atau modal yang diberikan, serta pentingnya mempertahankan bantuan tersebut untuk pengembangan usaha bersama. Dalam bimbingan sosial ini, masyarakat diberi pemahaman bahwa bantuan bukan untuk dijual atau digunakan secara konsumtif, melainkan sebagai modal usaha yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Penyaluran bantuan KUBE di Kabupaten Bandung dilakukan secara terstruktur dan disesuaikan dengan potensi usaha yang dimiliki oleh kelompok. Jenis bantuan yang diberikan berupa barang modal usaha seperti ternak domba, bahan dagang beras, peralatan warung, alat konveksi jahit, dan bahan olahan pangan. Kelompok KUBE dapat memilih jenis bantuan yang paling sesuai dengan kemampuan dan potensi usaha mereka, sehingga peluang keberhasilan usaha bersama semakin besar.

Proses penyaluran bantuan ini dilakukan setelah kelompok memenuhi semua persyaratan administratif dan teknis, termasuk pengesahan oleh kepala desa dan keputusan resmi Bupati. Waktu yang dibutuhkan dari pengusulan proposal hingga pencairan bantuan biasanya sekitar satu tahun, menunjukkan ketelitian dan kehati-hatian Dinas Sosial dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan kelompok.

Salah satu aspek utama dalam pelaksanaan program adalah pendampingan intensif yang dilakukan oleh tenaga pendamping yang direkrut oleh Dinas Sosial. Pendamping ini berasal dari pilar sosial di wilayah setempat, seperti Karang Taruna, pekerja sosial masyarakat, atau relawan sosial. Mereka bukan pegawai tetap, melainkan menerima insentif berdasarkan laporan hasil pendampingan yang dilakukan.

Pendamping bertugas melakukan kunjungan lapangan minimal dua kali sebulan untuk memantau pencatatan administrasi kelompok, kondisi keuangan, dan perkembangan usaha. Selain itu, pendamping juga memberikan bimbingan teknis dan sosial agar kelompok tetap solid dan mampu mengelola usaha bersama dengan baik. Pendampingan ini dirancang

berlangsung minimal dua tahun untuk memastikan keberlanjutan usaha dan membantu kelompok mengatasi kendala yang muncul selama pelaksanaan.

Pemerintah Kabupaten Bandung juga secara aktif mengawasi pelaksanaan program KUBE melalui Dinas Sosial dan perangkat desa. Pengawasan ini meliputi validasi data, pengawasan penggunaan bantuan, serta evaluasi hasil usaha kelompok. Pemerintah daerah juga menetapkan jumlah pendamping berdasarkan jumlah kelompok di setiap kecamatan agar pendampingan berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah.

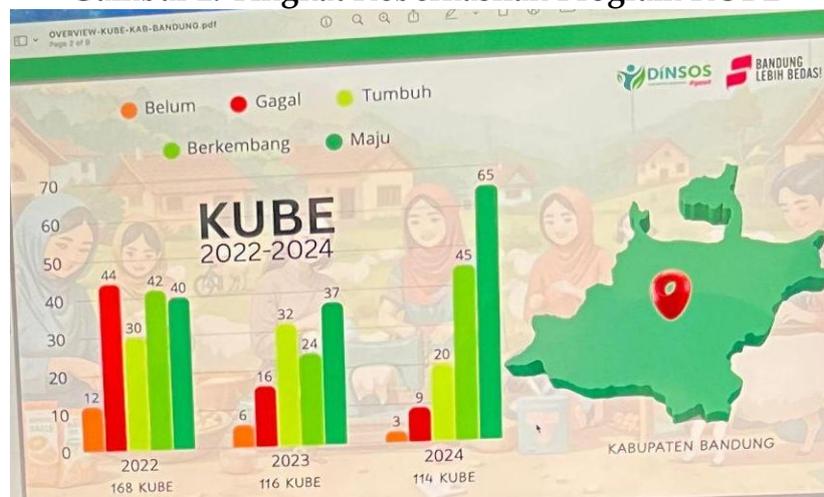
c. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Dinas Sosial Kabupaten Bandung menetapkan mekanisme monitoring yang melibatkan pendamping KUBE yang ditugaskan di setiap wilayah kecamatan. Pendamping melakukan kunjungan lapangan minimal dua kali dalam sebulan untuk memeriksa pencatatan administrasi, kondisi keuangan, dan perkembangan usaha kelompok. Selain itu, pendamping melaporkan hasil monitoring secara berkala kepada Dinas Sosial. Laporan ini menjadi bahan evaluasi dan bahan diskusi dalam rapat koordinasi antara pendamping, koordinator pendamping, dan Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial.

Evaluasi program KUBE di Kabupaten Bandung menggunakan indikator keberhasilan yang merujuk pada Permensos No. 25 Tahun 2015. Indikator ini mengkategorikan kelompok KUBE ke dalam empat status, yaitu gagal, tumbuh, berkembang, dan maju. Kategori ini didasarkan pada aspek-aspek seperti kohesivitas kelompok, peningkatan pendapatan anggota, pengelolaan usaha, dan keberlanjutan usaha.⁷

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan, terdapat beberapa temuan penting yang menjadi tantangan bagi keberhasilan program KUBE. Misalnya, pada tahun 2022 ditemukan bahwa banyak kelompok mengalami kegagalan akibat putusnya pendampingan dan pecahnya kelompok. Hal ini menyebabkan barang bantuan dijual atau usaha tidak dikelola dengan baik.

Gambar 2. Tingkat Keberhasilan Program KUBE



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bandung

⁷ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, hlm. 9

Selain itu, laporan pelaksanaan KUBE dari anggota kelompok seringkali tidak rutin dibuat, sehingga informasi yang diterima Dinas Sosial tidak lengkap dan menyulitkan evaluasi yang akurat. Dalam beberapa kasus, laporan hanya dibuat jika ada masalah antar anggota, bukan sebagai laporan perkembangan usaha.

d. Kendala

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah mindset masyarakat penerima bantuan yang cenderung bergantung pada bantuan pemerintah. Banyak anggota kelompok KUBE yang masih memiliki pola pikir “tangan di bawah”, mengharapkan bantuan terus menerus tanpa berusaha mandiri. Selain itu, kohesivitas kelompok seringkali menjadi masalah. Pecahnya kelompok akibat konflik internal atau kurangnya solidaritas menyebabkan kegagalan usaha bersama.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan. Pendamping KUBE yang direkrut oleh Dinas Sosial menerima insentif, bukan gaji tetap, sehingga motivasi dan kontinuitas pendampingan terkadang berkurang. Pada tahun 2022, banyak kelompok mengalami kegagalan karena putusnya pendampingan setelah masa dua atau tiga tahun, sehingga kelompok kehilangan arahan dan pengawasan yang memadai.

Proses administrasi yang panjang dan birokrasi yang ketat juga menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan program KUBE. Proses pengajuan proposal, verifikasi, validasi, hingga pencairan bantuan memakan waktu yang cukup lama, sekitar satu tahun dari pengusulan hingga penyaluran bantuan. Hal ini menyebabkan kelompok harus menunggu lama untuk mendapatkan bantuan, sehingga semangat dan motivasi kelompok dapat menurun.

Kendala lain yaitu ketidakdisiplinan administrasi, laporan keuangan yang tidak lengkap, serta sosialisasi dan pelatihan yang minim dan hanya dilakukan sekali sebelum bantuan diberikan. Akibatnya, banyak kelompok kurang paham dalam mengelola bantuan, sehingga terjadi kesalahan manajemen, seperti ternak mati atau usaha warung gagal. Beberapa bantuan juga tidak sesuai dengan potensi dan budaya lokal, yang menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan.

Kondisi ekonomi yang rentan membuat sebagian kelompok menjual bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, keterbatasan anggaran dan pendampingan, birokrasi yang panjang, serta lemahnya manajemen kelompok menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh melalui peningkatan kapasitas pendamping, penguatan manajemen kelompok, serta perbaikan sistem pelaporan agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dampak

Berdasarkan penelitian Suharto (2017), program KUBE telah menunjukkan capaian yang cukup signifikan dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Rata-rata pendapatan anggota KUBE meningkat sebesar 30-40% dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun sejak bergabung dalam program ini. Peningkatan tersebut terjadi secara bertahap dan berkelanjutan,

khususnya pada kelompok yang memiliki tata kelola usaha yang baik, keterampilan kewirausahaan yang memadai, dan intensitas pendampingan dari tenaga sosial yang tinggi.⁸

Dari perspektif sosial-ekonomi, program KUBE juga terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bandung. Laporan Kementerian Sosial RI (2022) menyebutkan bahwa sekitar 65% kelompok KUBE yang terbentuk berhasil mencapai tingkat keberhasilan usaha yang memadai, baik dari sisi keberlanjutan kegiatan usaha maupun peningkatan pendapatan anggotanya. Program ini juga memberikan dampak turunan dalam bentuk meningkatnya literasi keuangan, kesadaran kolektif akan pentingnya kerja sama, serta tumbuhnya motivasi untuk mengembangkan usaha secara mandiri.⁹

Dalam laporan tahunan Dinas Sosial Kabupaten Bandung (2023), disebutkan bahwa lebih dari 200 kelompok KUBE telah terbentuk dan aktif bergerak di berbagai sektor seperti perdagangan kecil, pertanian hortikultura, peternakan skala rumah tangga, serta industri kreatif dan kerajinan. Dari jumlah tersebut, sekitar 75% KUBE dilaporkan mampu berkembang menjadi unit usaha yang produktif dan menciptakan lapangan kerja baru, baik bagi anggota keluarga maupun masyarakat sekitar.¹⁰

Aspek pemberdayaan perempuan menjadi salah satu keberhasilan penting program KUBE di Kabupaten Bandung. Prijono (2020) mencatat bahwa lebih dari 60% anggota KUBE adalah perempuan yang sebelumnya tidak memiliki peran aktif dalam kegiatan ekonomi. Melalui program ini, perempuan tidak hanya memperoleh keterampilan teknis dan penghasilan tambahan, tetapi juga mengalami peningkatan rasa percaya diri, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta peran strategis dalam mendukung kesejahteraan keluarga.¹¹

Inovasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuce Sariningsih (2018) di beberapa daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat, inovasi dalam program KUBE yang dimaksud bersifat sederhana. Misalnya, dengan mengatur ulang cara mengemas produk, mencatat keuangan dengan lebih rapi, atau mencoba strategi baru dalam menjual barang yang sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar.¹² Namun, hasil penelitian tersebut juga mengungkap bahwa tingkat inovasi para anggota KUBE masih belum maksimal. Banyak di antara mereka yang belum bisa memecahkan masalah usaha secara kreatif karena masih kurang memahami apa itu inovasi, kurang semangat, dan belum mendapat dukungan yang cukup dalam hal manajemen usaha.

Di Kabupaten Bandung, program ini telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian sejak pertama kali diterapkan. Wawancara dengan M. Fitriani Ramadhan, Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten

⁸ Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

⁹ Kementerian Sosial RI. (2022). *Pedoman Pelaksanaan dan Pengembangan KUBE*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

¹⁰ Dinas Sosial Kabupaten Bandung. (2023). *Laporan Tahunan Program KUBE Kabupaten Bandung*. Bandung: Dinsos Kabupaten Bandung.

¹¹ Prijono, O. S. (2020). *Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Alfabeta.

¹² Yuce Sariningsih. (2018). Kreativitas dan Inovasi Pelaku KUBE. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1(1), hlm. 20.

Bandung, mengungkapkan bahwa mulai tahun 2026 program KUBE akan mengalami transformasi penting, terutama dalam aspek pendanaan dan pendampingan.

Inovasi pertama yang disoroti adalah perubahan bentuk bantuan dari barang menjadi uang tunai. Menurut narasumber, selama tahun 2024 hingga 2025, bantuan KUBE hanya terbatas pada bentuk barang yang mendukung empat jenis usaha tertentu, yaitu peternakan domba, warung sembako, konveksi, dan usaha beras. Meskipun keempat jenis usaha ini telah dirancang untuk menjangkau kebutuhan dasar masyarakat, kenyataannya banyak penerima manfaat KUBE memiliki potensi usaha yang berbeda dan tidak terakomodasi dalam skema tersebut. Akibatnya, banyak bantuan yang kurang optimal pemanfaatannya karena tidak sesuai dengan minat dan kompetensi warga.¹³

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh artikel resmi milik Dinas Sosial Kabupaten Bandung yang diterbitkan di situs bandungdayasentosa.co.id. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa selain bantuan dalam bentuk hibah barang dan pelatihan, terdapat juga program dana bergulir dari Bupati Bandung yang disalurkan melalui BPR Kerta Raharja. Program ini bertujuan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat dalam rangka mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.

Inovasi selanjutnya yang tidak kalah penting adalah penguatan dalam aspek pendampingan. Menurut Fitriani Ramadhan, salah satu kelemahan program KUBE di masa lalu adalah minimnya pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Pendamping KUBE umumnya hanya ditugaskan selama periode satu tahun, yang sering kali belum cukup untuk membina dan memastikan usaha yang dirintis oleh kelompok KUBE bisa berkembang dan mandiri. Oleh karena itu, mulai tahun 2026 pemerintah daerah merencanakan sistem pendampingan minimal dua tahun bagi setiap pendamping KUBE.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil riset kami, implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung telah dilakukan dengan baik dan memberikan hasil yang nyata. Hal ini ditunjukkan oleh menurunnya jumlah masyarakat miskin sejak tahun 2022. Meskipun telah berjalan sejak tahun 2009, keefektifan dari program ini mulai terasa pada tahun 2022 karena pada tahun sebelumnya, terjadi pemutusan pendampingan dan kelompok-kelompok usaha yang terpecah di beberapa daerah. Hal tersebut menimbulkan kegagalan yang cukup besar pada beberapa kelompok. Tetapi, Dinas Sosial Kabupaten Bandung mengevaluasi hal tersebut dengan pengimplementasian yang lebih baik dari sebelumnya. Perencanaan dilakukan dengan bersama-sama melalui musrenbang yang diikuti oleh beberapa lapisan masyarakat. Hal ini diikuti oleh pelaksanaannya yang diawali oleh bimbingan teknis pada tiap kelompok dan didistribusikan bantuan untuk kelompok tersebut dalam bentuk barang sesuai kategori dari tiap kelompok. Namun, masih terdapat kendala yaitu masyarakat menjadi bergantung pada bantuan pemerintah, konflik internal kelompok, dan jumlah pendamping yang terbatas. Meskipun begitu, program ini telah memberikan dampak baik diantaranya meningkatkan pendapatan para anggotanya, menciptakan berbagai lapangan pekerjaan baru,

¹³ Hasil Wawancara Terkait Inovasi KUBE Bersama Bapak M. Fitriani Ramadhan, Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

dan mengurangi jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bandung. Dinas sosial pun terus berupaya melakukan inovasi dalam program KUBE ini, seperti yang direncanakan akan dilaksanakan mulai tahun 2026. Dimana, bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial tidak lagi berupa barang melainkan berupa uang tunai untuk menunjang kebutuhan tiap kelompok agar usahanya lebih berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial

Buku

Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

Fiantika, F. R. & dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Hendrarti, Ika M. (2020). *Sistem Informasi Kemiskinan Terpadu: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Bappenas.

Kumara. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Ahmad Dahlan.

Kuncoro, Mudrajad. (2016). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardikanto, T. (2021). *Konsep-konsep pemberdayaan masyarakat*. Surakarta: UNS Press.

Martono, Nanang. (2021). *Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Nasdian, F. T. (2020). *Pengembangan masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara.

Nugroho, Riant. (2020). *Kebijakan Publik di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia.

Prijono, O. S. (2020). *Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan*. Bandung: Alfabeta.

Rahardjo, Dawam. (2021). *Pembangunan Pasca Pandemi: Harapan Baru Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: LP3ES.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2017). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sumarto, Sudarno. (2020). *Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Era Digital*. Jakarta: SMERU Research Institute.

Sumodiningrat, G. (2019). *Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mas'ud, M., Bahtiar, Rahman, A. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an*. Makassar: Citra Multi Persada.

Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Skripsi/Tesis

Fadillah, R. (2018). *Eksistensi Media Online Terhadap Pemasaran Media Cetak Haluan Riau*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). <https://repository.uin-suska.ac.id/16672/>

Hendrikus, M. B. (2016). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kelompok Usaha Bersama*. Tugas Akhir Program Magister.

Paalloan, A. I. (2023). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2021*. Tesis S1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <https://e-journal.uajy.ac.id/30065/3/191125079%202.pdf>

Artikel Jurnal

Afiffah, S. R., Fortuna, O. D., Kusumah, T. M., & Fauzi, A. (2022). Penerapan Strategi Digital Marketing Model AIDA dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Cakrawala, Rawalumbu, Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 623-630.

Hermawati, Wati. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 156-170.

Kusumadewi, A. (2024). Analisis Penyebab, Konsekuensi dan Solusi Potret Kemiskinan di Indonesia Pasca Era Reformasi. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2 (3), 27-37. <https://doi.org/10.30640/trending.v213.2533>

Ningtyas, A. R. (2012). *Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui KUBE di Kabupaten Malang*. Universitas Brawijaya. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/6219/>

Prasetyo, Bambang. (2021). Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Multidimensi. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 7(2), 89-104.

Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10 (3), 295-324. <https://doi.org/10.22146/jsp.11009>

Rini, A. S. (2016). Faktor-faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 01(2), 17-33. <https://www.neliti.com/id/publications/98593/faktor-faktor-penentu-kemiskinan-di-indonesia-analisis-rumah-tangga#cite>

Sariningsih, Y. (2018). Kreativitas dan inovasi pelaku KUBE. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 18-35.

Sariningsih, Y., Anwar, A., Mardlihyah, A. H., & Margaretha, A. (2024). VALUE BASED MANAGEMENT AT KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE): English. *Journal Sampurasun: Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage*, 10(1), 59-71.

- Sukirman, Halimah, M., Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kabupaten Bandung. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora, Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 57-70. <https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/34691>
- Suryahadi, Asep. (2018). Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 19(1), 44-62.
- Wijayanto, Bambang. (2019). "Karakteristik Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 8(3), 123-138.
- Wulansari R., Fadhilah N., Huda M., Abidin A., & Sujianto A. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Teknologi*, 6 (1), 82-95. <https://doi.org/https://doi.org/10.32500/jematech.v6i1.3928>
- Yusra, Z. (2021). Pengelolaan LKP Pada Masa Pendmik COVID-19. *Journal Lifelog Learning*, 4 (1), 15-22. <https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>

Media Lainnya

- Bandung Daya Sentosa. (2023, Juli 31). *KUBE memajukan Kabupaten Bandung bersama-sama*. <https://bandungdayasentosa.co.id/kube-memajukan-kabupaten-bandung-bersama-sama/>
- Bappeda Kabupaten Bandung. (2023). *Peta Kemiskinan Kabupaten Bandung*.
- BMKG Jawa Barat. (2023). *Data Iklim Kabupaten Bandung*
- BPS Kabupaten Bandung. (2024). *Jumlah Penduduk menurut Kecamatan*.
- BPS Kabupaten Bandung. (2024). *Kabupaten Bandung dalam Angka*.
- Darmawan, A. D. (2025). *Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/e0a43ae7a64f03e/6-19-penduduk-di-kabupaten-bandung-masuk-kategori-miskin#:~:text=Persentase%20penduduk%20miskin%20di%20Kabupaten%20Bandung%2C%20data%20per%2030%20November,yang%20dilaporkan%206%2C4%20persen.>
- Dinas Sosial Kalimantan Barat. (2019). *Prosedur Pengusulan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*.
- Dinas Sosial Kabupaten Bandung. (2023). *Laporan tahunan program KUBE Kabupaten Bandung*. Bandung: Dinsos Kabupaten Bandung.
- Dinas Sosial Kabupaten Bandung. (2024). *Laporan Program Pemberdayaan Masyarakat*.
- Dinas Sosial Kabupaten Bandung. *Dinas Sosial Kabupaten Bandung*. Dinsos Bandung Kab. <https://dinsos.bandungkab.go.id>
- Kementerian Sosial RI. (2022). *Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitas Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Menjadi Koperasi*. Jakarta: Kementerian Sosial RI. <https://jdih.kemensos.go.id/detail/Pedoman-pelaksanaan-pembinaan-dan-fasilitas-pembentukan-kelo-0f8ad193-a>
- Kementerian Sosial RI. (2023). *Evaluasi Program KUBE Nasional*. Jakarta: Kementerian Sosial RI. <https://kemensos.go.id>
- Kementerian Sosial RI. (2022). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Warga Binaan Sosial Masyarakat Terasing*. Jakarta: Kementerian Sosial

RI. <https://jdih.kemensos.go.id/detail/Petunjuk-teknis-pelaksanaan-kelompok-usaha-bersama-%28-KUBE-%29-0f8b211b-a>

Pemerintah Kabupaten Bandung. (2021). *Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026*. <https://ppid.bandungkab.go.id/detail/badan-perencanaan-pembangunan-penelitian-dan-pengembangan-daerah-rencana-pembangunan-jangka-menengah-daerah-rpjmd-kabupaten-bandung-tahun-2021-2026>

Pemerintah Kabupaten Bandung. (2023). *Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026*. <https://jdih.bandungkab.go.id/hukum/download/12902>

Priadana, M. S. (2010). *Analisis Faktor Penentu Keberhasilan serta Dampak dari Kelompok Usaha Bersama di Jawa Barat*. Universitas Pasundan. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/30175210>

Suwaji. (13 April 2025). *Berapa Luas Kabupaten Bandung? Cek Cakupan Wilayah Daerah Strategis dengan Segudang Potensi yang Masih Tersembunyi*. Ulas Bandung. <https://www.ulasbandung.com/ulaspedia/1441192596/berapa-luas-kabupaten-bandung-cek-cakupan-wilayah-daerah-strategis-dengan-segudang-potensi-yang-masih-tersembunyi>